

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Senin, 11 Juli 2022 adalah awal dari berubahnya wajah institusi Polri. Tepat pada hari itu, mencuat sebuah berita yang diterbitkan oleh *TribunJambi.com* berjudul “Anggota Brimob Asal Jambi Tewas Usai Baku Tembak di Jakarta” menyisakan tanda tanya dari anggota keluarga Brigadir Yosua karena kesimpangsiuran penjelasan dari Polisi. Hal itu menjadi pemantik rasa penasaran warga Indonesia karena media mulai mengangkat berita kegagalan peristiwa di rumah Ferdy Sambo yang saat itu masih menjadi perwira tinggi Polri. Selasa, 12 Juli Kapolri membentuk tim khusus pengungkap fakta peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Ferdy Sambo (Ramadhan, 2022)

Awalnya, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka utama karena terlibat baku tembak hingga merenggut nyawa Brigadir Yosua, namun pengakuan Bharada E berubah di 5 Agustus dan terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka, pun Bharada E meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjadi *Justice Collaborator* (tvonenews, 2022). Kasus ini akhirnya menjadi kasus besar karena dicurigai ada orang yang memiliki pengaruh besar terlibat ambil peran, terlebih kecurigaan publik tertuju pada Irjenpol Ferdy Sambo yang awalnya membantah terlibat pembunuhan Brigadir Yosua. *Sejauh-jauhnya tupai melompat, pasti akan jatuh juga* adalah kutipan untuk menggambarkan apa yang dialami Ferdy Sambo karena pada 9 Agustus, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan tersangka pada Ferdy Sambo dan ketiga orang lainnya.

Dengan adanya perkara pembunuhan Brigadir Yosua, ada potensi pencederaan supermasi sipil. Oknum polisi yang semena-mena menggunakan kekuasaan dan akses senjata bisa sangat mengancam warga sipil yang dianggap mengusik (Wiguna, 2022). Disinilah dibutuhkan peran sipil sebagai pengawas Polri. Agar suasana demokrasi terjaga, kalangan angkatan bersenjata yang memiliki kekuatan monopoli atas penggunaan kekerasan harus berada di bawah pengawasan sipil (Pearce, 2020). Salah satu pihak sipil yang menjadi aktor kunci

dimulainya kegaduhan akibat kasus yang menjerat salah satu petinggi Polri yakni Pers.

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah masuk ke *New Media* (Media Baru). Denis McQuail (dalam Lintang Muliawanti, 2018: 83) menjelaskan bahwa Media Baru adalah sebuah kondisi dimana adanya saling keterhubungan akses terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka dan sifatnya yang ada di mana-mana (Muliawanti, 2018). Melalui pemberitaan kegagalan kematian seorang Polisi sebagai implementasi keterbukaan informasi pada Media Baru, Jurnalis secara tidak langsung ikut andil dalam membongkar sebuah kasus besar pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk dapat membongkar kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dibutuhkan kelihaihan Jurnalis untuk mengamati segala sesuatu serta integritas jurnalis menjalankan kode etik Jurnalis.

Pemberitaan pembunuhan Brigadir Yosua bukan tanpa kendala, tekanan justru datang dari pihak kepolisian. Menurut pengakuan Aryo Tondang, selaku jurnalis Tribun Jambi ketika diwawancarai di kanal Youtube Suryatv – Indonesia Latest News dengan judul “LIVE TRIBUNJAMBI – JURNALIS PEMBUKA PEMBUNUHAN BRIGADIR YOSUA”, Tepat setelah Tribun Jambi menaikkan berita berjudul “Anggota Brimob Asal Jambi Tewas Usai Baku Tembak di Jakarta”, Aryo Tondang dihubungi oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Jambi yang menyarankan kepada Tribun Jambi untuk tidak membuat gaduh namun Aryo Tondang membalas bahwa suara keluarga korban harus diteruskan.

Tidak hanya Tribun Jambi yang mengalami intervensi dari oknum Polisi, tekanan juga dirasakan oleh dua jurnalis *CNNIndonesia.com* dan *20Detik*. Kamis (14/7) siang, saat kedua jurnalis tersebut sedang dalam proses pencarian narasumber, bertemulah mereka dengan petugas kebersihan kompleks perumahan TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Saat mereka sedang dalam perjalanan ke rumah narasumber, mereka dihampiri oleh 3 orang oknum Polisi tanpa tanda pengenal yang mengambil paksa ponsel kedua jurnalis tersebut dan

menghapus rekaman investigasi (terkini.id, 2022). Tekanan demi tekanan dirasakan oleh jurnalis, hal ini memungkinkan jurnalis tidak menjalankan kode etik jurnalistik bilamana terjerumus godaan atau hambatan dan menghalangi proses penyampaian kebenaran.

Semakin cepatnya penyebaran informasi, kepekaan jurnalis yang sigap meliput sebuah kasus dan integritas jurnalis yang menolak intervensi dari oknum Polisi, menjadikan insiden pembunuhan Brigadir Yosua adalah perkara yang sangat besar serta membuat banyak institusi termasuk Presiden Indonesia, Joko Widodo menyorot langkah Polri untuk mengusut tuntas kasus dan berbenah diri menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang mencuat tatkala kasus Ferdy Sambo terungkap seperti yang diungkapkan Sugeng Teguh Santosa dari *Indonesia Police Watch* (IPW) dalam wawancara dengan Narasi, menjelaskan bahwa ada kelompok mafia di tubuh Polri. Selain itu, Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, menilai adanya sikap kode senyap di tubuh Polri yakni sikap untuk menutup-nutupi kasus pidana yang melibatkan Polisi.

Tak hanya harus menyelesaikan tugas di tubuhnya sendiri, Polri juga bertanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh Lingkaran Suvei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap Polisi menurun pasca pemberitaan pembunuhan Brigadir Yosua. Tahun 2019, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ada di angka 72,1%, survei kembali dilakukan pada 11-20 September 2022 yaitu setelah kasus Ferdy Sambo mencuat. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik pada Polri menurun ke angka 59,1% (Lingkaran Suvei Indonesia, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk meneliti peran jurnalis sebagai pengawas dalam pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang walaupun mengalami tekanan, namun jurnalis tetap memberitakan misteri pembunuhan berencana yang menyeret puluhan anggota Polisi dan membuat kasus tersebut menjadi urgensi Polri.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Fokus penelitian ini adalah peran jurnalis sebagai pengawas dalam pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah

- a) Apa esensi pengawasan jurnalis pada penguasa?
- b) Bagaimana peran jurnalis sebagai pengawas dalam pemberitaan kasus pembunuhan brigadir Yosua?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran jurnalis sebagai pengawas dalam pemberitaan kasus pembunuhan brigadir Yosua

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Jurnalisme sebagai pengetahuan pendukung dalam mempersiapkan seorang calon Jurnalis.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan perenungan kepada semua pihak tentang bagaimana pentingnya peran Jurnalis.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia atau pihak penguasa lainnya diharapkan menjadi masukan untuk terus mengingat bahwa peran pengawas dari masyarakat melalui Jurnalis mampu membawa pengaruh besar.
- b) Manfaat bagi Jurnalis, penelitian diharapkan menjadi motivasi untuk menjunjung tinggi integritas dan kode etik Jurnalis